

Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat (CBT) di Situ Gunung Sukabumi: Integrasi Partisipasi Lokal, Layanan Hospitality, dan Keberlanjutan Destinasi

Hidayah Dwi Cahyati¹, Julyanis Fatko², Siti Aisyah Maulida³, Putri Naila Lestari⁴, Evi Muliya^{5*}

^{1,2,3,4,5*}Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syari

Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

e-mail: ^{5*}evimuliyah@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan ekowisata berbasis konservasi memerlukan keterlibatan masyarakat lokal agar manfaat ekonomi dari kegiatan wisata dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan. Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi, merupakan kawasan ekowisata yang melibatkan masyarakat dalam berbagai aktivitas pelayanan wisata dan konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat dalam mendukung ekowisata berbasis konservasi, mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat keterlibatan masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan pada Juni 2026. Informan berjumlah 16 orang yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berperan dalam rantai pasok hospitality melalui penyediaan kuliner, transportasi lokal, pemanduan wisata, dan penyewaan perlengkapan. Masyarakat juga terlibat dalam tata kelola dan keamanan melalui kemitraan, patroli, pengawasan, serta dalam kebersihan dan konservasi melalui pengumpulan sampah, gotong royong, dan kegiatan konservasi. Partisipasi masyarakat berbentuk *spontaneous* dan *induced participation*. Faktor pendukung meliputi peluang ekonomi, kebutuhan wisatawan, pengetahuan lokal, kepedulian lingkungan, dan kemitraan, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan akses usaha, perizinan, persyaratan kompetensi, keterbatasan pengawasan, serta perilaku wisatawan yang masih membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat, perluasan akses usaha, peningkatan kompetensi, serta penguatan koordinasi antara masyarakat dan pengelola untuk mewujudkan ekowisata yang berkelanjutan.

Kata kunci:

Ekowisata Berbasis Konservasi; Masyarakat; Partisipasi; Situ Gunung

ABSTRACT

Conservation-based ecotourism development requires the involvement of local communities so that the economic benefits of tourism activities can go hand in hand with environmental sustainability. Situ Gunung, Sukabumi Regency, is an ecotourism area that involves local communities in various tourism service and conservation activities. This study aims to analyze the role of local communities in supporting conservation-based ecotourism, identify forms of community participation in maintaining environmental sustainability, and analyze the supporting and inhibiting factors affecting community involvement. This study employed a descriptive method with a qualitative approach and was conducted in June 2026. A total of 16 informants were selected through purposive sampling. The results showed that local communities play a role in the hospitality supply chain by providing culinary services, local transportation, tour guiding, and equipment rental. Communities are also involved in destination governance and security through partnerships, patrols, and monitoring, as well as in cleanliness and conservation through waste collection, communal activities, and conservation initiatives. Community participation takes the forms of spontaneous and induced participation. Supporting factors include economic opportunities, tourists' needs, local knowledge, environmental awareness, and partnerships, while inhibiting factors include limited access to business opportunities, licensing requirements, competency requirements, limited monitoring capacity, and tourist behavior involving littering. Therefore, strengthening community capacity, expanding access to business opportunities, improving competencies, and strengthening coordination between local communities and destination managers are necessary to achieve sustainable ecotourism.

Keywords:

Conservation-Based Ecotourism; Community; Participation; Situ Gunung

A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Manuhutu *et al.*, 2024). Sebagai sektor yang strategis, pariwisata berperan dalam membuka berbagai kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, serta turut

memberikan dampak positif terhadap nilai tukar mata uang (Anggara *et al.*, 2025).

Sektor pariwisata berperan dalam peningkatan ekonomi nasional dan memiliki keterkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga pengembangannya perlu memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, salah satu bentuk pengembangannya yaitu ekowisata. Ekowisata sangat erat kaitannya dengan prinsip konservasi. Ekowisata merupakan bentuk usaha yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat yang

tinggal di dalam maupun sekitar kawasan konservasi. Dengan begitu masyarakat dapat memanfaatkan keindahan alam yang masih utuh, budaya, dan sejarah setempat tanpa merusak atau menjual isinya (Wijayanto *et al.*, 2024).

Situ Gunung yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan salah satu destinasi ekowisata yang mengintegrasikan pemanfaatan potensi alam dengan upaya konservasi melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal (Rezki *et al.*, 2021). Keterlibatan masyarakat menjadi aspek penting dalam pengelolaan ekowisata karena masyarakat berperan sebagai pelaku utama yang mendukung aktivitas wisata sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan. Penelitian Sundawati *et al.* (2024) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam pengelolaan ekowisata Situ Gunung sehingga perlu diperkuat melalui strategi yang mampu meningkatkan peran masyarakat dalam kegiatan ekowisata dengan tetap menjaga keseimbangan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.

Perkembangan kawasan wisata Situ Gunung juga ditandai dengan semakin beragamnya fasilitas dan layanan wisata yang ditawarkan kepada pengunjung, salah satunya Situ Gunung *Suspension Bridge* sebagai salah satu atraksi unggulan kawasan. Pengembangan atraksi tersebut berjalan bersama dengan penyediaan berbagai fasilitas pendukung wisata yang mendorong peningkatan aktivitas pelayanan dan ekonomi di sekitar destinasi. Pengembangan *Suspension Bridge* menunjukkan adanya komersialisasi atraksi wisata melalui penyediaan produk, fasilitas, dan layanan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kawasan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika *hospitality* lokal yang melibatkan pengelola, pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat sekitar dalam menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan. Masyarakat lokal dapat terlibat dalam aktivitas pendukung pariwisata, seperti perdagangan, penyediaan jasa, parkir, kebersihan, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas wisata. Penelitian Apriliani *et al.* (2023) mengenai pengembangan kawasan Situ Gunung *Suspension Bridge* menunjukkan bahwa pengembangan destinasi melibatkan masyarakat dan memberikan ruang bagi masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi di kawasan wisata. Perkembangan fasilitas dan layanan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan destinasi tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga memperluas aktivitas ekonomi dan interaksi antara pengelola wisata dengan masyarakat lokal.

Perkembangan pariwisata di kawasan Situ Gunung turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan destinasi. Pengembangan kawasan wisata memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk

memperoleh manfaat ekonomi melalui keterlibatan dalam kegiatan pariwisata dan pengembangan usaha masyarakat. Namun, ekspansi aktivitas dan orientasi bisnis pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan tekanan terhadap lingkungan apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan yang berkelanjutan. Muqsith *et al.* (2023) menunjukkan bahwa dalam pengembangan ekowisata Situ Gunung, aspek ekonomi menjadi prioritas utama, sementara aspek lingkungan masih relatif rendah dalam perhatian para aktor. Selain itu, keterbatasan kolaborasi antara pengelola, masyarakat lokal, dan pihak swasta menjadi salah satu permasalahan dalam pencapaian keberlanjutan ekowisata di kawasan tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dari pengembangan pariwisata dengan upaya mempertahankan fungsi ekologis kawasan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata di Situ Gunung perlu disertai dengan keterlibatan masyarakat dan penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan agar manfaat ekonomi bagi masyarakat dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga keseimbangan ekologis dan kelestarian lingkungan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata memiliki tingkat dan bentuk yang berbeda-beda, sehingga partisipasi masyarakat tidak cukup dipahami hanya berdasarkan ada atau tidaknya keterlibatan dalam kegiatan wisata. Menurut teori Tosun 2006 dalam Dewi & Arida (2025) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pariwisata dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu *spontaneous participation*, *induced participation*, dan *coercive participation*. Ketiga bentuk tersebut menggambarkan perbedaan tingkat keterlibatan masyarakat, baik yang berasal dari inisiatif masyarakat sendiri, keterlibatan yang muncul karena adanya dorongan dari pihak lain, maupun keterlibatan yang terbentuk karena adanya aturan atau ketentuan tertentu.

Selain partisipasi masyarakat, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan lokal juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan kawasan wisata. Kurniawan dan Maulana (2022) menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat di Desa Wisata Situ Gunung perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan institusi lokal, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Di sisi lain, penelitian Anjana *et al.* (2023) menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar kawasan wisata alam Situ Gunung memiliki kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan melalui strategi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran yang tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi wisata, tetapi juga dalam menjaga keberlangsungan kawasan wisata.

Pengelolaan ekowisata berbasis konservasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya alam

yang dimiliki, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kawasan. Keterlibatan tersebut berperan dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemahaman mengenai peran dan bentuk partisipasi masyarakat menjadi aspek yang penting untuk dikaji sebagai dasar dalam menyusun strategi pengelolaan kawasan yang berkelanjutan (Kaharuddin *et al.*, 2020).

Selain memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Situ Gunung juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap lingkungan, seperti meningkatnya timbunan sampah, gangguan terhadap habitat satwa, dan penurunan kualitas ekosistem apabila tidak dikelola secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan ekowisata tidak hanya bergantung pada pengelola kawasan, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung upaya konservasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat dalam mendukung ekowisata berbasis konservasi di Situ

Gunung, mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan ekowisata Situ Gunung, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran masyarakat dalam mendukung ekowisata berbasis konservasi di Situ Gunung.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran masyarakat dalam mendukung ekowisata berbasis konservasi di Kawasan Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2026 dengan melibatkan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka terlibat langsung dalam pengelolaan maupun pemanfaatan kawasan ekowisata. Jumlah informan sebanyak 16 orang, yang terdiri atas pedagang, pengelola wisata, petugas kebersihan, penyedia jasa transportasi lokal, masyarakat umum, dan perangkat desa. Profil informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Informan

No.	Inisial	Peran/Profesi	Durasi Usaha/Tinggal	Kode Informan
1.	EB	Pengelola Wisata	± 3 Tahun	K1
2.	F	Pengelola Wisata	± 5 Tahun	K2
3.	F	Pengelola Wisata	8 Tahun	K3
4.	B	Transportasi Lokal	± 45 Tahun	T1
5.	O	Transportasi Lokal	± 6 Bulan	T2
6.	R	Pedagang	< 10 Tahun	P1
7.	W	Pedagang	± 10 Tahun	P2
8.	A	Pedagang	> 15 Tahun	P3
9.	E	Pedagang	± 15 Tahun	P4
10.	D	Pedagang	± 30 Tahun	P5
11.	YB	Petugas Kebersihan	± 5 Tahun	B1
12.	D	Petugas Kebersihan	± 11 Tahun	B2
13.	MN	Masyarakat Umum	16 Tahun	M1
14.	Y	Masyarakat Umum	42 Tahun	M2
15.	I	Masyarakat Umum	44 Tahun	M3
16.	FM	Perangkat Desa	± 7 Tahun	D1

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi kawasan serta bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata berbasis konservasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada para informan untuk memperoleh informasi mengenai peran masyarakat, bentuk partisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keterlibatan masyarakat. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, dokumen pengelolaan, dan catatan lapangan.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan, yaitu pedagang, pengelola wisata, petugas kebersihan, penyedia jasa

transportasi lokal, masyarakat umum, dan perangkat desa. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan mengonfirmasi hasil wawancara melalui observasi lapangan dan dokumentasi. Perbandingan informasi dari berbagai sumber dan metode dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan kredibilitas data mengenai peran masyarakat dalam mendukung ekowisata berbasis konservasi di Kawasan Situ Gunung.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan interpretasi hasil penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan berdasarkan temuan yang diperoleh untuk memastikan

kesesuaian dan keabsahan hasil penelitian (Sugiyono, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Masyarakat dalam Rantai Pasok Hospitality

Rantai pasok *hospitality* dalam destinasi pariwisata mencakup keterhubungan berbagai pihak yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Dalam konteks destinasi berbasis masyarakat, masyarakat lokal dapat menempati posisi sebagai salah satu aktor dalam rantai pasok tersebut melalui penyediaan makanan, transportasi, pemanduan, maupun perlengkapan wisata. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena aktivitas wisata tidak hanya menghasilkan interaksi antara wisatawan dan pengelola destinasi,

tetapi juga menciptakan permintaan terhadap berbagai produk dan jasa yang dapat dipenuhi oleh pelaku ekonomi lokal.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa masyarakat sekitar kawasan wisata terlibat dalam rantai pasok *hospitality* melalui empat bentuk kegiatan, yaitu penyedia jasa kuliner/warung, transportasi lokal/ojek, pemanduan wisata, dan penyewaan perlengkapan wisata. Keempat bentuk keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari aktivitas pariwisata, tetapi juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa yang mendukung pemenuhan kebutuhan wisatawan. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok *hospitality* tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Peran Masyarakat dalam Rantai Pasok *Hospitality*

Matriks Peran	Bentuk Partisipasi	Faktor Pendukung/Penghambat
Penyedia jasa kuliner/warung	<i>Spontaneous</i> : masyarakat secara mandiri memanfaatkan aktivitas ekowisata dengan membuka usaha warung. <i>Induced</i> : keterlibatan masyarakat juga didukung oleh terbukanya kesempatan usaha di kawasan ekowisata.	Pendorong: peluang peningkatan pendapatan dan meningkatnya aktivitas wisatawan. Penghambat: tidak semua masyarakat sekitar terlibat langsung dalam kegiatan usaha wisata.
Transportasi lokal/ojek	<i>Spontaneous</i> : sebagian masyarakat mengajukan diri untuk menjadi penyedia jasa ojek. <i>Induced</i> : aktivitas ojek difasilitasi melalui mekanisme izin dari pihak Ekowisata Situ Gunung.	Pendorong: kebutuhan mobilitas wisatawan dan peluang ekonomi. Penghambat: adanya ketentuan izin dan pengaturan jasa transportasi.
Pemanduan wisata	<i>Spontaneous</i> : masyarakat memanfaatkan pengetahuan lokal untuk menjadi pemandu. <i>Induced</i> : pemandu tergabung dalam komunitas, memperoleh pelatihan, dan harus memenuhi persyaratan tertentu.	Pendorong: pengetahuan masyarakat mengenai kawasan dan kebutuhan wisatawan. Penghambat: persyaratan kompetensi, sertifikasi, dan perizinan.
Penyewaan perlengkapan wisata	<i>Spontaneous</i> : masyarakat memanfaatkan peluang ekowisata dengan menyediakan perlengkapan seperti tenda.	Pendorong: kebutuhan wisatawan dan peluang ekonomi. Penghambat: keterlibatan terbatas pada masyarakat yang memiliki izin usaha.

Berdasarkan Tabel 2, keterlibatan masyarakat terdapat pada beberapa bagian dalam rantai pelayanan wisata, mulai dari kebutuhan konsumsi, mobilitas, pengalaman wisata, hingga perlengkapan pendukung aktivitas wisatawan. Penyedia jasa kuliner atau warung berperan memenuhi kebutuhan makanan dan minuman wisatawan, sedangkan penyedia transportasi lokal atau ojek mendukung mobilitas wisatawan. Pada jasa pemanduan, masyarakat memanfaatkan pengetahuan lokal mengenai kawasan untuk memberikan informasi dan pendampingan kepada wisatawan. Sementara itu, penyewaan perlengkapan wisata menunjukkan adanya respons masyarakat terhadap kebutuhan wisatawan terhadap fasilitas pendukung aktivitas wisata. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara aktivitas wisatawan dan aktivitas ekonomi masyarakat lokal, karena kebutuhan yang muncul dari kunjungan wisatawan dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk menyediakan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok *hospitality* tidak berlangsung dengan tingkat akses yang sama. Penyediaan jasa kuliner dan penyewaan perlengkapan wisata cenderung dilakukan atas inisiatif masyarakat dengan memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari aktivitas wisata. Sementara itu, keterlibatan dalam jasa transportasi lokal dan pemanduan wisata memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan mekanisme pengelolaan kawasan, seperti izin, komunitas, pelatihan, dan persyaratan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peluang ekonomi dari aktivitas wisata memang dapat mendorong masyarakat untuk terlibat, tetapi akses terhadap setiap bentuk kegiatan ekonomi tetap dipengaruhi oleh aturan dan mekanisme kelembagaan yang berlaku di kawasan wisata Situ Gunung. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahayu *et al.* (2016) yang menunjukkan bahwa pengembangan *community-based tourism* membutuhkan dukungan pengembangan destinasi, pemasaran, serta kemitraan

agar keterlibatan masyarakat dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi secara lebih optimal.

Perbedaan bentuk keterlibatan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep partisipasi masyarakat Tosun (2006). Tosun menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata memiliki tingkatan yang berbeda, salah satunya berupa *induced participation* dan *spontaneous participation*. Berdasarkan konsep tersebut, keterlibatan masyarakat dalam membuka usaha warung dan menyediakan perlengkapan wisata menunjukkan karakter *spontaneous participation* karena muncul dari inisiatif masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang dihasilkan oleh aktivitas wisata. Masyarakat secara mandiri mengidentifikasi kebutuhan wisatawan kemudian menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebaliknya, keterlibatan masyarakat sebagai penyedia jasa transportasi lokal dan pemandu wisata menunjukkan karakter *induced participation* karena terdapat mekanisme pengaturan, perizinan, komunitas, pelatihan, atau persyaratan tertentu yang menjadi bagian dari proses keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam rantai pasok *hospitality* pada kawasan wisata Situ Gunung tidak bersifat seragam, tetapi dipengaruhi oleh jenis kegiatan dan tingkat regulasi yang melekat pada kegiatan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak cukup dipahami berdasarkan ada atau tidaknya partisipasi, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses dan kesempatan untuk masuk ke dalam rantai pasok pariwisata.

Keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok *hospitality* juga memiliki implikasi terhadap distribusi manfaat ekonomi pariwisata. Salah satu persoalan dalam ekonomi pariwisata adalah *economic leakage*, yaitu kondisi ketika sebagian pengeluaran wisatawan tidak bertahan di dalam perekonomian destinasi, tetapi mengalir keluar melalui penggunaan barang dan jasa dari luar, tenaga kerja eksternal, kepemilikan usaha dari luar, atau pembayaran lainnya. Suryawardani *et al.* (2016) dalam penelitian mengenai *tourism leakage* pada sektor akomodasi di Bali menunjukkan bahwa pengeluaran wisatawan tidak seluruhnya bertahan dalam perekonomian lokal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya *tourism leakage* pada sektor akomodasi yang antara lain disebabkan oleh penggunaan produk dan jasa impor, tenaga kerja asing, biaya manajemen, serta transfer keuntungan kepada pemilik usaha dari luar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa besarnya aktivitas wisata tidak secara otomatis menjamin seluruh manfaat ekonomi diterima oleh masyarakat lokal.

Dalam konteks penelitian ini, keberadaan masyarakat sebagai penyedia jasa kuliner, transportasi, pemanduan, dan penyewaan perlengkapan menunjukkan adanya peluang untuk mempertahankan sebagian pengeluaran wisatawan di tingkat lokal. Ketika wisatawan membeli makanan dari warung

masyarakat, menggunakan jasa ojek lokal, menggunakan jasa pemandu lokal, atau menyewa perlengkapan dari masyarakat sekitar, sebagian pengeluaran tersebut secara langsung menjadi pendapatan bagi pelaku ekonomi lokal. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok *hospitality* dapat menjadi salah satu mekanisme untuk meningkatkan retensi ekonomi lokal dan mengurangi potensi *economic leakage*. Namun, keterlibatan pelaku usaha lokal tidak secara otomatis menghilangkan kebocoran ekonomi karena pelaku usaha masih dapat menggunakan bahan baku, produk, atau jasa yang berasal dari luar kawasan. Oleh karena itu, penguatan rantai pasok lokal tidak hanya perlu memperhatikan jumlah pelaku usaha masyarakat yang terlibat, tetapi juga keterhubungan usaha tersebut dengan pemasok dan pelaku ekonomi lokal lainnya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian *community-based tourism* di Indonesia yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Penelitian Jamalina dan Wardani (2017) mengenai pengembangan ekowisata berbasis *community-based tourism* di Desa Wisata Nglanggeran menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal. Penelitian Popa *et al.* (2024) juga menunjukkan bahwa pengelolaan wisata berbasis masyarakat dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, Rahayu *et al.* (2016) menunjukkan bahwa *community-based tourism* dapat menjadi strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan destinasi, pemasaran, dan kemitraan. Hasil penelitian tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi ketika memiliki ruang untuk terlibat dalam penyediaan barang dan jasa pariwisata.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok *hospitality* belum sepenuhnya merata. Sebagian masyarakat dapat secara mandiri memanfaatkan peluang usaha yang muncul dari aktivitas wisata, sedangkan kegiatan tertentu, seperti transportasi lokal dan pemanduan wisata, memerlukan izin, kompetensi, sertifikasi, pelatihan, atau persyaratan tertentu. Faktor yang mendorong keterlibatan masyarakat meliputi peluang peningkatan pendapatan, meningkatnya aktivitas wisatawan, kebutuhan terhadap barang dan jasa wisata, serta pengetahuan masyarakat mengenai kawasan. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan akses terhadap usaha, ketentuan perizinan dan pengaturan jasa transportasi, serta persyaratan kompetensi dan sertifikasi bagi pemandu wisata. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok *hospitality* tidak hanya dipengaruhi oleh

tersedianya peluang ekonomi, tetapi juga memerlukan akses, peningkatan kapasitas, dan dukungan kelembagaan agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan rantai pasok *hospitality* perlu diarahkan pada peningkatan akses dan kapasitas masyarakat lokal untuk terlibat dalam penyediaan barang dan jasa wisata. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan usaha, fasilitasi perizinan, peningkatan kompetensi pemandu, penguatan komunitas penyedia jasa wisata, serta pembukaan akses yang lebih luas terhadap peluang usaha di kawasan wisata. Selain itu, keterlibatan masyarakat perlu diperkuat tidak hanya pada tahap penyediaan barang dan jasa kepada wisatawan, tetapi juga melalui keterhubungan dengan pemasok lokal lainnya agar manfaat ekonomi dapat menyebar lebih luas di dalam masyarakat. Penguatan keterhubungan tersebut dapat meningkatkan posisi masyarakat dalam rantai pasok *hospitality* sekaligus membuka peluang agar sebagian pengeluaran wisatawan tetap berputar dalam perekonomian lokal.

Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok *hospitality* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk partisipasi dalam aktivitas pariwisata, tetapi juga berpotensi menjadi strategi untuk meningkatkan distribusi manfaat ekonomi dan mengurangi potensi *economic leakage* di kawasan wisata.

Peran Masyarakat dalam Tata Kelola & Keamanan Destinasi

Keterlibatan masyarakat dalam tata kelola dan keamanan destinasi di Situ Gunung terlihat melalui hubungan kemitraan antara masyarakat lokal dengan pengelola kawasan, khususnya dalam kegiatan pendampingan, patroli, pengawasan, dan pelayanan pengunjung. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha ekowisata, tetapi juga dilibatkan dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan kawasan konservasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk keterlibatan tersebut mencakup keikutsertaan masyarakat dalam kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA), kegiatan patroli, pendampingan pengunjung (*tour guide*), serta dukungan terhadap pengelolaan kawasan. Temuan tersebut dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Matriks Peran Masyarakat dalam Tata Kelola dan Keamanan Destinasi

Matriks Peran	Bentuk Partisipasi	Faktor Pendukung/Penghambat
Co-management	<i>Induced</i> : masyarakat dilibatkan melalui kemitraan dengan pengelola ekowisata Situ Gunung, seperti MPA dan MMP. Sebagian keterlibatan berlangsung secara sukarela (<i>voluntary</i>).	Pendorong: kerja sama masyarakat dan pengelola, adanya program kemitraan, serta keterbatasan jumlah petugas. Penghambat: tidak seluruh masyarakat terlibat dalam kelompok kemitraan
Patroli partisipatif	<i>Induced</i> : masyarakat mengikuti patroli bersama petugas berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. <i>Spontaneous</i> : sebagian keterlibatan muncul dari kesediaan masyarakat membantu pengawasan kawasan.	Pendorong: kepedulian terhadap kawasan, program MPA/MMP, dan kebutuhan tambahan tenaga pengawasan. Penghambat: keterbatasan SDM pengelola dan luas kawasan yang harus diawasi.
Pengawasan kawasan	<i>Spontaneous/induced</i> : masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan dapat membantu memberikan informasi apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau aktivitas yang mengancam kawasan.	Pendorong: kedekatan masyarakat dengan kawasan dan hubungan baik dengan petugas. Penghambat: pengawasan masyarakat belum merata.

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa masyarakat di sekitar Situ Gunung telah memiliki posisi dalam tata kelola ekowisata, meskipun keterlibatannya berlangsung melalui bentuk kemitraan dengan pihak pengelola. Pengelola menjelaskan bahwa masyarakat dari desa penyangga dilibatkan dalam kegiatan konservasi melalui kelompok MMP dan MPA. Keterlibatan tersebut diwujudkan melalui pendampingan kegiatan, patroli, dan pengawasan kawasan. Pengelola juga menyebutkan bahwa sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai ojek dan pemandu wisata turut bergabung dalam MPA dengan sukarela.

Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya pola *co-management*, yaitu pengelolaan destinasi yang tidak sepenuhnya dilakukan oleh pengelola kawasan, tetapi memperoleh dukungan dari masyarakat lokal. Hal ini terlihat dari pernyataan

pengelola bahwa pengelolaan kawasan ekowisata tidak dapat dilakukan oleh petugas secara mandiri sehingga masyarakat perlu dilibatkan dalam menjaga dan mengelola ekowisata Situ Gunung. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Londa, (2020) ekowisata memang seharusnya mampu melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pengembangan pengelolaan ekowisata. Hubungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan bersama, seperti pendampingan dan evakuasi, yang menurut pengelola dapat membantu menghemat waktu dan memperkuat pengelolaan kawasan.

Pola *co-management* di Situ Gunung berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar keputusan formal mengenai pengelolaan, penempatan petugas, dan pemberian izin berada pada pihak pengelola ekowisata Situ Gunung. Petugas kawasan Situ Gunung dipilih dan ditentukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, sedangkan izin ojek yang beroperasi di kawasan ekowisata harus

memperoleh izin terdahulu dari pihak pengelola Ekowisata Situ Gunung. Pemandu wisata juga harus tergabung dalam komunitas dan memenuhi persyaratan tertentu, seperti kepemilikan identitas dan sertifikat pemandu serta mengikuti pelatihan. Dengan demikian, masyarakat telah berfungsi sebagai mitra operasional dalam pengelolaan ekowisata, tetapi kewenangan formal masih berada pada institusi pengelola.

Partisipasi masyarakat dalam tata kelola dan keamanan destinasi di Situ Gunung menunjukkan keterlibatan masyarakat sebagai mitra dalam mendukung pengelolaan ekowisata. Keterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan ekowisata tidak sepenuhnya dilakukan oleh pihak pengelola, tetapi juga memperoleh dukungan dari masyarakat di desa penyangga. Keberadaan masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan keamanan menjadi penting mengingat kawasan wisata Situ Gunung sekaligus merupakan kawasan konservasi dengan aktivitas wisata yang cukup intensif (Lestary *et al.*, 2022). Dengan demikian, keterlibatan masyarakat memiliki fungsi ganda, yaitu mendukung kelancaran aktivitas pariwisata sekaligus membantu menjaga keberlangsungan fungsi ekologis kawasan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dari teori Tosun 2006 dalam tata kelola dan keamanan destinasi di Situ Gunung lebih merepresentasikan *induced participation* daripada *spontaneous participation*. *Induced participation* ditandai oleh keterlibatan masyarakat yang difasilitasi atau diarahkan oleh pihak eksternal, sedangkan *spontaneous participation* menempatkan masyarakat pada posisi yang lebih mandiri dalam menentukan dan melaksanakan kegiatan pariwisata. Di Situ Gunung, bentuk partisipasi *induced* terlihat dari adanya struktur kelompok, mekanisme perizinan, serta kegiatan patroli yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh pengelola. Temuan tersebut sejalan dengan Atma Aulia *et al.* (2024) yang menjelaskan bahwa bentuk *induced participation* banyak ditemukan dalam pengembangan pariwisata di negara berkembang, ketika masyarakat lokal dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan dan memperoleh manfaat dari aktivitas pariwisata, tetapi belum memiliki ruang yang memadai dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, terdapat indikasi *spontaneous*

participation melalui keterlibatan sukarela masyarakat dalam kegiatan konservasi dan pengawasan kawasan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya bersifat *top-down*, tetapi mulai berkembang melalui kesadaran dan inisiatif lokal. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat masih lebih dominan pada tahap pelaksanaan kegiatan dan belum menunjukkan posisi yang kuat dalam menentukan agenda maupun keputusan strategis pengelolaan destinasi. Pola ini memperlihatkan bahwa hubungan masyarakat dan pengelola telah mengarah pada *co-management*, tetapi masih berada pada tingkat operasional karena kewenangan formal dalam pengelolaan kawasan tetap berada pada institusi pengelola.

Hal ini menunjukkan bahwa penguatan partisipasi masyarakat di Situ Gunung perlu diarahkan bukan hanya pada peningkatan jumlah masyarakat yang terlibat, tetapi juga pada peningkatan kualitas keterlibatan. Pengelola dapat memperluas ruang masyarakat dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan destinasi. Dengan demikian, keterlibatan yang saat ini masih dominan pada tingkat operasional dapat berkembang menuju partisipasi yang lebih mandiri dan bermakna. Penguatan tersebut juga dapat memperkuat mekanisme *co-management* antara masyarakat lokal dan pengelola kawasan dalam menjaga keseimbangan antara fungsi wisata, keamanan, dan konservasi.

Peran Masyarakat dalam Operasional Kebersihan dan Konservasi Fisik

Kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekowisata di Situ Gunung. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola, tetapi juga melibatkan masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di kawasan wisata. Keterlibatan masyarakat terlihat melalui kegiatan mengumpulkan sampah, membersihkan area sekitar tempat usaha, mengikuti gotong royong, serta berpartisipasi dalam kegiatan konservasi. Namun, bentuk partisipasi masyarakat tidak seluruhnya muncul dengan pola yang sama. Sebagian kegiatan dilakukan berdasarkan arahan atau program pengelola, sedangkan sebagian lainnya dilakukan atas kesadaran dan inisiatif masyarakat sendiri. Temuan ini di rangkum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Matriks Peran Masyarakat dalam Kebersihan dan Konservasi Fisik

Matriks Peran	Bentuk Partisipasi	Faktor Pendukung/Penghambat
Kebersihan kawasan	<i>Induced</i> : masyarakat seperti pedagang, ojek, dan pelaku jasa wisata mengikuti kegiatan bersih-bersih setelah periode kunjungan ramai. <i>Spontaneous</i> : sebagian pelaku usaha membersihkan area di sekitar aktivitasnya secara mandiri.	Pendorong: kesadaran menjaga kenyamanan wisatawan, arahan/jadwal pengelola, dan kepentingan menjaga lingkungan. Penghambat: masih terdapat pengunjung yang membuang sampah sembarangan.
Pengumpulan dan pengelolaan sampah	<i>Induced</i> : masyarakat mengumpulkan sampah dan mengikuti sistem pengangkutan yang telah ditetapkan.	Pendorong: tersedianya sistem pengangkutan dan pembagian tanggung jawab. Penghambat: perilaku membuang sampah sembarangan dari pengunjung.

Gotong royong/perawatan lingkungan	<i>Spontaneous</i> : masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong berdasarkan kesediaan. <i>Induced</i> : kegiatan tertentu dilakukan berdasarkan program atau arahan pengelola.	Pendorong: budaya gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Penghambat: kegiatan tidak selalu berlangsung secara rutin.
Konservasi kawasan	<i>Induced</i> : masyarakat dilibatkan dalam sosialisasi, patroli, penanaman, dan kegiatan konservasi. <i>Spontaneous</i> : sebagian masyarakat secara sukarela membantu menjaga lingkungan dan melaporkan aktivitas yang mengganggu kawasan.	Pendorong: program konservasi, kemitraan, dan kesadaran masyarakat. Penghambat: keterbatasan pengawasan dan masih adanya aktivitas yang berpotensi mengganggu kawasan.

Berdasarkan hasil Tabel 4, masyarakat terlibat dalam menjaga kebersihan dan konservasi fisik melalui berbagai kegiatan, baik yang dilakukan bersama pengelola maupun atas inisiatif sendiri. Keterlibatan tersebut terlihat dari kegiatan membersihkan area sekitar tempat beraktivitas, mengumpulkan sampah, mengikuti kegiatan gotong royong, hingga membantu kegiatan konservasi. Sebagian kegiatan dilakukan berdasarkan arahan atau jadwal yang ditetapkan pengelola, sementara kegiatan lainnya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat di sekitar tempat mereka beraktivitas. Pola keterlibatan seperti ini menunjukkan adanya unsur *induced participation* sekaligus *spontaneous participation* dalam peran masyarakat di Situ Gunung.

Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki posisi penting dalam menjaga keberlanjutan aktivitas wisata. Masyarakat yang beraktivitas langsung di kawasan memiliki interaksi yang dekat dengan kondisi lingkungan sehari-hari, sehingga kegiatan seperti mengumpulkan sampah, menjaga kebersihan sekitar tempat usaha, dan mengikuti gotong royong menjadi bagian dari kontribusi terhadap kualitas destinasi. Hal ini sejalan dengan Kaharuddin *et al.* (2020) yang menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan ekowisata karena dapat mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Namun, upaya tersebut masih menghadapi kendala, terutama karena sebagian pengunjung belum menunjukkan perilaku yang sejalan dengan prinsip kebersihan dan konservasi. Kondisi tersebut terlihat dari masih ditemukannya pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Temuan ini menunjukkan adanya persoalan dalam hubungan antara masyarakat lokal sebagai *host* dan wisatawan sebagai *guest*. Perilaku wisatawan dalam menggunakan ruang dan fasilitas wisata menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kondisi lingkungan destinasi. Aktivitas wisata yang tidak disertai dengan perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan dapat meningkatkan timbunan sampah dan menambah beban pengelolaan kebersihan bagi masyarakat maupun pengelola. Dengan demikian,

keberlanjutan kebersihan dan konservasi tidak hanya dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh perilaku wisatawan selama berada di

kawasan Situ Gunung. Masyarakat sebagai pihak yang tinggal dan beraktivitas di kawasan memiliki kepentingan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan destinasi, sedangkan wisatawan merupakan pengguna ruang dan fasilitas wisata. Ketika sebagian wisatawan tidak menjaga kebersihan, beban menjaga kualitas lingkungan menjadi lebih besar bagi masyarakat dan pengelola.

Perilaku sebagian wisatawan yang masih membuang sampah sembarangan menunjukkan bahwa belum semua pengunjung memiliki kepedulian yang sama terhadap kondisi lingkungan destinasi. Dalam perspektif *tourist behavior*, kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas wisata belum selalu diikuti oleh perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Padahal, dalam ekowisata, keberadaan wisatawan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan terhadap lingkungan apabila aktivitasnya tidak disertai dengan kesadaran untuk menjaga kelestarian kawasan. Oleh karena itu, keberhasilan konservasi tidak cukup hanya mengandalkan partisipasi masyarakat sebagai *host*, tetapi juga memerlukan perubahan perilaku wisatawan sebagai *guest*.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperkuat *visitor code of conduct* atau kode etik wisatawan. Kode etik biasanya memuat norma atau aturan mengenai perilaku yang perlu dihindari maupun dipatuhi oleh wisatawan selama berkunjung, sehingga dapat membantu mengarahkan perilaku pengunjung sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan (Prayudi, 2023). Dalam kawasan Situ Gunung, aturan tersebut dapat mencakup kewajiban membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, tidak merusak vegetasi dan fasilitas, serta mematuhi ketentuan yang berlaku di kawasan konservasi. Dengan adanya aturan yang jelas, wisatawan memiliki pedoman mengenai perilaku yang diharapkan selama melakukan aktivitas wisata.

Selain isi aturan, penempatan kode etik juga perlu diperhatikan agar informasi tersebut mudah dilihat oleh wisatawan. Kode etik sebaiknya ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat oleh pengunjung, seperti di sepanjang jalan setapak, tempat pemberhentian, serta pada titik-titik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran (Saputra, 2017). Penempatan pada lokasi tersebut membuat kode etik dapat berfungsi sebagai pengingat selama wisatawan berada di kawasan, terutama pada area yang

ramai dikunjungi atau memiliki potensi lebih besar terhadap timbulan sampah dan gangguan lingkungan. Di kawasan Situ Gunung, imbauan mengenai kebersihan dan aturan bagi pengunjung telah tersedia pada beberapa titik. Namun, keberadaannya belum mencakup seluruh lokasi yang menjadi tempat aktivitas wisatawan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian aturan masih dapat diperkuat, terutama pada titik-titik yang ramai dilalui atau menjadi tempat berkumpulnya pengunjung.

Penguatan aturan tidak hanya dapat dilakukan melalui kode etik tertulis, tetapi juga melalui penyampaian secara lisan oleh pengelola atau pemandu kepada wisatawan. Arahan secara langsung dapat membantu pengunjung memahami perilaku yang perlu diperhatikan selama berada di kawasan, seperti menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak mengganggu lingkungan. Dengan demikian, kode etik tertulis yang telah tersedia pada beberapa titik dapat diperkuat melalui penyampaian lisan dan pengawasan di lapangan, terutama pada lokasi yang belum memiliki informasi tertulis. Upaya tersebut sekaligus memperkuat peran pengelola dan pelaku jasa wisata dalam mengarahkan perilaku wisatawan.

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah berperan dalam operasional kebersihan dan konservasi fisik melalui partisipasi yang bersifat *induced* maupun *spontaneous*. Meskipun masyarakat telah berperan dalam menjaga kondisi kawasan, keberlanjutan upaya tersebut masih dipengaruhi oleh perilaku wisatawan dan pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, pengelolaan ekowisata berbasis konservasi perlu memperkuat peran masyarakat sekaligus mendorong perilaku wisatawan yang lebih bertanggung jawab, sehingga manfaat ekonomi dari kegiatan wisata dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan kebersihan dan keberlanjutan ekologis kawasan.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung ekowisata berbasis konservasi di Kawasan Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi, melalui keterlibatan dalam aspek ekonomi, pelayanan wisata, tata kelola dan keamanan, serta kebersihan dan konservasi kawasan. Pada aspek rantai pasok *hospitality*, masyarakat terlibat sebagai penyedia jasa kuliner/warung, transportasi lokal/ojek, pemanduan wisata, dan penyewaan perlengkapan wisata. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya inisiatif masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi sekaligus keterlibatan yang difasilitasi melalui mekanisme pengelolaan kawasan. Masyarakat juga berperan dalam mendukung keamanan, kebersihan, dan kelestarian kawasan sebagai mitra operasional pengelola. Peluang peningkatan pendapatan, kebutuhan wisatawan, meningkatnya aktivitas wisata, dan pengetahuan lokal menjadi faktor

yang mendorong keterlibatan masyarakat, sedangkan perizinan, persyaratan kompetensi dan sertifikasi, serta keterbatasan akses terhadap peluang usaha menjadi faktor yang membatasi partisipasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui penyediaan barang dan jasa wisata, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan fungsi ekowisata dan konservasi kawasan.

Pengelola perlu memperkuat keterlibatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, fasilitasi perizinan, pelatihan, serta perluasan akses terhadap peluang usaha dan rantai pasok wisata. Koordinasi antara masyarakat dan pengelola juga perlu diperkuat dalam kegiatan pelayanan wisata, kebersihan, pengawasan, dan konservasi agar manfaat ekonomi dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan di Kawasan Situ Gunung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, B., Budiman, Sumardani, R., & Martina, C. D. (2025). A Systematic Literature Review on The Economic Impact of Local Communities on High Priority Destinations in the Indonesian area. *Sadar Wisata. Jurnal Pariwisata*, 8(2), 156–168.
- Anjana, M. R., Rachmawati, E., & Soekmadi, R. (2023). Adaptation and mitigation strategy of communities around the natural tourism area of Situgunung during the COVID-19 pandemic. *Media Konservasi*, 28(1), 59–68.
- Apriliani, A. V., Meigawati, D., & Amirulloh, M. R. (2023). Supervisory function of the tourism office in the development of the Gunung Situ Suspension Bridge area. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 21(2), 246–260.
- Atma Aulia, S. A. D. R., Nara, N., & Djaing, H. (2024). Tipologi partisipasi masyarakat dalam program desa wisata: Studi kasus Desa Timusu. *Development Policy and Management Review*, 4(2), 92–106.
- Dewi, N. W. S., & Arida, I. N. S. (2025). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. *Jurnal IPTA*, 13(2), 237–245.
- Jamalina, I. A., & Wardani, D. T. K. (2017). Strategi pengembangan ekowisata melalui konsep community based tourism (CBT) dan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1), 71–85.
<https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.4008>
- Kaharuddin, Pudyatmoko, S., Fandeli, C., & Martani, W. (2020). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 14(1), 42–54. <https://doi.org/10.22146/jik.57462>

- Kurniawan, F. H., & Maulana, M. A. (2022). Model strategi pengembangan masyarakat berbasis desa wisata di Situ Gunung Sukabumi. *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(2), 219–236. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i2.1366>
- Lestary, S. P. D., Hidayat, J. T., & Waskitaningsih, N. (2022). Potensi Dan Kendala Pengembangan Kawasan Taman Wisata Alam (Twa) Situ Gunung Di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Teknik Majalah Ilmiah Fakultas Teknik Unpak*, 23(2).
- Londa, R. C. . (2020). Efektivitas pengelolaan desa ekowisata di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(89), 18–31
- Manuhutu, F., Rediyasa, I. W., & Pricilia, J. (2024). Analisis Peraturan Undang-Undang Kepariwisata Republik Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), 14173 – 14179.
- Muqsyith, I. A., Mardiana, R., & Dharmawan, A. H. (2023). Pencapaian SDGs pada kawasan ekowisata (Studi kasus: Situ Gunung Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(4), 740–754. <https://doi.org/10.14710/jil.21.4.740-754>
- Popa, A. H., Ibrahim, M., et al. (2024). Pengelola Pariwisata Berbasis Masyarakat. *JEMAI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akutansi*, 3(3), 83–90.
- Prayudi, A. M. (2023). Penerapan Kode Etik Pariwisata pada Desa Wisata di Yogyakarta untuk Mencapai Sustainable Development Goals. *Edutourism Journal of Tourism Research*, 5(1), 16–30.
- Rahayu, S., Dewi, Utami., & Fitriana, K. N. (2016). Pengembangan community based tourism sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humanioa*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.13111>
- Rezki, A., Lidiawati, I., Supriono, B., Kehutanan, F., Nusa Bangsa Jl H Sholeh Iskandar Km, U. K., Sareal Bogor, T., & H Sholeh Iskandar Km, J. K. (2021). Nilai Ekonomi Kegunaan Wisata Alam Situgunung Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (The Economic Value of Situgunung Nature Tourism Gunung Gede Pangrango National Park). *Jurnal Nusa Sylva*, 21(2), 48–55.
- Saputra, E. (2017). Koed Etik Wisatawan dalam Menunjang Kelestarian Gunung Api Purba Nglanggeran. *Jurnal Ilmiah Pesona*, 2(2), 1–10.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sundawati, L., Ilham, Q. P., Rohim, Solikhah, I., Dhevi, S. K., & Salsabila, N. H. (2024). Strategi penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata Situ Gunung di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. *Jurnal ForestIndo*, 1(1), 47–59.
- Suryawardani, I. G. A. O., Bendesa, I. K. G., et al. (2014). Tourism leakage of the accommodation sector in Bali. *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism*, 13(1), 3–18.
- Tosun, C. (2006). Expected nature of community participation in tourism development. *Tourism Management*, 27(3), 493–504.
- Wijayanto, N., Putra, R. K., & Silviana, A. (2024). Kebijakan konsep ekowisata berbasis konservasi lingkungan. *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*, 5(3) 409 – 420.